

Vol. 1, NO. 2, Mei - Oktober 2020

ISSN: 2722-7170 (p); 2722-2543 (e)

# *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*

# *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*

E-ISSN: 2722-2543

P-ISSN: 2722-7170

Vol. 1 No. 2, Mei - Oktober 2020

## **Editorial Team:**

Editor In-Chief

Zaenal Muttaqin, IAIN Surakarta, Central Java

Managing Editor

Azzah Nilawaty, IAIN Surakarta, Central Java

Editors

Alfina Hidayah Malik, IAIN Surakarta, Central Java

Mei Candra Mahardika, IAIN Surakarta, Central Java

Arif Eko Priyo Atmojo, IAIN Surakarta, Central Java

Reviewer

Abd. Halim, IAIN Surakarta, Central Java

Nur Rohman, IAIN Surakarta, Central Java

Nur Kafid, IAIN Surakarta, Central Java

**Alamat Redaksi:** Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta.

Jl. Pandawa No. 1, Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah, 57168

Phone: +62271-781516, Fax: +62271-782774.

email: [jurnal.ajipp@gmail.com](mailto:jurnal.ajipp@gmail.com)

<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/ajipp/index>

# *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*

E-ISSN: 2722-2543

P-ISSN: 2722-7170

Vol. 1 No. 2, Mei - Oktober 2020

## **Tabel of Content**

REINTERPRETASI SURAT AL-FIIL DALAM KONTEKS WABAH  
~ Mahbub Ghozali, Chandra Kartika Dewi ..... 89-112

MAKNA *AHL* DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF SEMANTIK  
'AISYAH BINTU SYATHI'  
~ Muhammad Rosyid, Muhammad Anwar Idris ..... 113-130

SENJAKALA TRADISI KENDURIAN DI DESA GRAJEGAN:  
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI AGAMA  
~ Azzah Nilawaty ..... 131-144

PANDANGAN POLITIK JARINGAN ISLAM LIBERAL DI  
INDONESIA  
~ Ana Sabhana Azmy, Amri Yusra ..... 145-174

KONSEP MODERASI ISLAM DALAM ETIKA KEUTAMAAN  
ARISTOTELES  
~ M. Khusnun Ni'am, Puput Dwi Lestari ..... 175-194

## PANDANGAN POLITIK JARINGAN ISLAM LIBERAL DI INDONESIA

**Ana Sabhana Azmy**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

**Amri Yusra**

Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

### Abstrak

#### Kata kunci:

Jaringan  
Islam Liberal;  
Islam Politik;  
Demokrasi

Artikel ini bertujuan untuk melihat pandangan politik Jaringan Islam Liberal di Indonesia. Sebagai komunitas yang ingin melakukan pembaharuan dengan semangat modernisasi dan rasionalitas dalam beragama, melihatnya dalam kontestasi politik dan demokrasi di Indonesia menjadi menarik dilakukan. Sehingga artikel ini mempertanyakan dua hal; bagaimana pandangan JIL terhadap relevansi agama dan politik? dan bagaimana pandangan JIL terhadap implementasi demokrasi?. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan yang berupaya mengumpulkan data-data dari artikel jurnal, buku, dan bahan bacaan lainnya yang terkait. Artikel ini menunjukkan bahwa Jaringan Islam Liberal menolak bentuk-bentuk politik Islam yang mencoba memperjuangkan superioritas sistem nilai dan simbol Islam secara formal dalam wilayah politik. Jaringan Islam liberal juga menolak gagasan negara Islam serta formalisasi syari'ah. Jaringan ini melihat demokrasi sebagai nilai yang harus diimplementasikan dalam sebuah negara. Hal ini karena sesuai dengan hak dasar yang harus dimiliki oleh individu, yang dikenal sebagai hak asasi manusia.

### Abstract

#### Keywords:

Jaringan  
Islam Liberal;  
Islam Politics;  
Democracy

*This article aims to observe the political views of the Jaringan Islam Liberal (JIL/Liberal Islam Network) in Indonesia. As a community who wants to carry out religious reformations under the spirit of modernization and rationality, it is interesting to examine JIL in the context of political and democratic contestation in Indonesia. This*

*article questions two things; first, how does JIL view the relevance of religion and politics? Second, how does JIL view the implementation of democracy? The method used in this paper is a literature study that seeks to collect data from journal articles, books, and other related reading materials. This article shows that JIL rejects any forms of political Islam which try to establish formally the superiority of Islamic values, systems and symbols in the political sphere. JIL also rejects the idea of an Islamic state and the formalization of syari'a. It also considers democracy as a value that must be implemented in a country. This is because it is in accordance with the basic rights belong to every human being.*

## **Pendahuluan**

Fazlur Rahman, seorang intelektual Islam berkebangsaan Pakistan sebagai tokoh yang hadir dari neo modernisme berpandangan bahwa sejarah gerakan pembaruan Islam selama dua abad terakhir dibagi menjadi empat; (1) Gerakan revivalis di akhir abad 18 dan awal abad 19 (gerakan Wahabiyah di Arab, Sanusiyah di Afrika Utara dan Fulaniyah di Afrika Barat, (2) Gerakan modernis (yang dipeolopori di India oleh Sayyid Akhmad Khan, meninggal tahun 1898), dan di seluruh Timur Tengah oleh Jamal al-Din al-Afghani, meninggal tahun 1897, dan di Mesir oleh Muhammad 'Abduh, meninggal tahun 1905, (3) Neo revivalisme (yang modern namun agak reaksioner, terdapat Mawdudi beserta kelompok Jama'ati Islami nya di Pakistan dan terakhir (4) Neo modernisme (dimana Fazlur Rahman sendiri mengkategorikan dirinya ke dalam wilayah ini dengan alasan karena gerakan neo modernisme mempunyai sintesis progressif dari rasionalitas modernis dengan ijtihad dan tradisi klasik). Fazlur Rahman menganggap bahwa neo modernisme adalah prasyarat utama bagi *Renaissance Islam*.<sup>1</sup>

Fazlur Rahman adalah tokoh neo modernisme Islam dan salah seorang penggagas utama yang menjabarkan nilai-nilai Islam ke dalam

---

<sup>1</sup> Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wabib, dan Abdurrahman Wabid* (Jakarta: Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999).

kerangka pemahaman yang religius humanitaristik. Hasil yang paling tampak adalah sistematisasi nilai-nilai Islam yang liberal, namun tetap ortodoks. Baik Islam liberal maupun paradigma neo modernis berangkat dari latar belakang yang sama, yaitu modernisme Islam. Pemikiran neo modernisme sebagaimana ditunjukkan oleh Rahman, telah menghasilkan metodologi dan konsep-konsep teologi yang sempurna serta membangun suatu teologi yang diupayakan lebih mengakar kepada Al-Qur'an dengan menggunakan metodologi yang mengarahkan kepada liberalisme. Menurut Rahman, gerakan-gerakan revivalisme sebagaimana disinggung oleh Kurzman sebagai lawan dari Islam liberal-menghidupkan kembali makna dan pentingnya norma Al-Qur'an di tiap masa. Mereka adalah kelompok pra-modern “fundamentalis-tradisionalis-konservatif”, yang memberontak melawan penafsiran Al-Qur'an yang digerakkan oleh tradisi keagamaan. Rahman menggunakan istilah kebangkitan kembali ortodoksi untuk kemunculan fundamentalisme Islam. Rahman juga menyebut kaum fundamentalis sebagai “orang-orang yang dangkal dan superfisial”.<sup>2</sup>

Sepanjang tahun 1970-an, 1980-an hingga kini, Indonesia telah melihat sebuah kebangkitan Islam yang sangat progresif dan memiliki masa depan. Hal tersebut adalah fenomena yang luar biasa dan cukup mengejutkan jika dibanding dengan apa yang sering disebut sebagai “*Islamic Revival*” (kebangunan kembali Islam) yang pernah dialami Malaysia dan negara-negara Islam lainnya yang mempunyai nilai lebih Islam dari Indonesia. Meski demikian, Barton dalam bukunya menyebutkan bahwa hal yang perlu disadari adalah bahwa kebangkitan Islam di masyarakat Indonesia, utamanya kelas menengah kota, bukanlah sebuah kebangkitan untuk tertarik pada Islam abad ke-19 atau Islam tahun 1950-an. Namun kebangkitan yang terdiri dari berbagai aliran, dan salah satunya yang paling dominan adalah perhatian pada Islam kontekstual dan substansial yang diterjemahkan untuk Indonesia tahun 1990-an dan masa depan. Barton menjelaskan bahwa pada umumnya Islam aliran ini dikenal sebagai

---

<sup>2</sup> Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme* (Jakarta: Grasindo, 2010).

‘moderat’, ‘liberal’ dan ‘progresif’. Ciri-ciri tersebut sangat mewarnai *Islamic Revival* masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagian ilmuwan memahami Islam liberal sebagai sebuah aliran pemikiran yang tidak lagi mempercayai Islam sebagai agama yang didasarkan pada Al-Qur’an dan hadis karena intelektual liberal sering melakukan kritik atas pemahaman kitab suci Al-Qur’an dan juga hadis Nabi. Salah satu ilmuwan yang ada, ialah Charles Kurzman yang menilai liberalisme sebagai kosakata yang mengandung makna adanya gagasan yang secara terus menerus dalam memberikan pemahaman atas kitab suci untuk disesuaikan dengan modernitas, rasionalitas, dan tidak menekankan pada segi bahasa *leterlijk*. Lebih lanjut menurut Kurzman, Islam sebenarnya adalah agama yang bisa dipahami dengan sejumlah cara, dan salah satunya dengan cara liberal. Jika merujuk pada khazanah pemikiran Islam, paham keagamaan di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi tiga; paham Islam adat, paham Islam revivalis dan paham Islam liberal. Islam liberal dinilai oleh Kurzman berusaha menghadirkan lagi Islam di masa lampau sesuai dengan perkembangan zaman, modernitas.<sup>4</sup>

Kurzman melalui pemahaman atas syari’ah membagi kembali liberalisme Islam pada tiga model; (1) liberalisme Islam yang didukung secara tegas dan eksplisit oleh syari’ah atau Al-Qur’an dan hadis. (2) liberalisme Islam yang sekalipun tidak didukung secara tegas oleh doktrin-doktrin Islam, umat Islam bebas untuk adopsi sikap liberal dalam hal yang oleh syar’i dibiarkan terbuka untuk dipahami oleh akal budi serta kecerdasan manusia dan (3) liberalisme Islam yang didukung oleh syari’ah dan manusia dibebaskan untuk menafsirkannya sehingga muncul keragaman penafsiran.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*.

<sup>4</sup> Zuly Qodir, *Islam Liberal; Varian-varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2010).

<sup>5</sup> Zuly Qodir, *Islam Liberal; Varian-varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002..*

Dalam potret perkembangan Islam liberal di Indonesia, mengutip paparan Luthfi Assyaukanie, bahwa kemunculan Islam liberal mulai dipopulerkan tahun 1950-an, namun mulai berkembang pesat utamanya di Indonesia pada tahun 1980-an, yaitu oleh tokoh utama dan sumber rujukan “utama” komunitas atau Jaringan Islam Liberal, Nurcholish Madjid. Nurcholish sendiri tidak pernah menggunakan istilah Islam liberal untuk mengembangkan gagasan-gagasan pemikirannya, namun ia juga tidak menentang ide-ide Islam liberal. Karenanya, Islam liberal tidak berbeda dengan gagasan-gagasan Islam yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur). Cak Nur dan teman-temannya masuk pada kelompok Islam yang tidak setuju dengan pemberlakuan syariat Islam secara formal oleh negara, mereka juga adalah kelompok yang intens memperjuangkan sekularisasi, emansipasi perempuan, “menyamakan” agama Islam dengan agama lain (pluralisme teologis), memperjuangkan demokrasi Barat dan sejenis itu. Menurut pemaparan Luthfi, pada konteks Islam liberal, ada empat agenda utama yang menjadi payung bagi persoalan yang dibahas oleh intelektual muslim selama kurun waktu tersebut; (1) agenda politik, (2) agenda toleransi agama, (3) agenda emansipasi perempuan, (4) dan agenda kebebasan berekspresi.<sup>6</sup>

Sosok Nurcholish Madjid sendiri tidak lepas dari sosok Fazlur Rahman. Di Indonesia, pemikiran Rahman sangat berpengaruh. Hak ini memang kontras dengan bagian dunia Islam lainnya, dimana pemikiran Rahman sepi dari perhatian khalayak. Fazlur Rahman datang pertama kali di Indonesia pada tahun 1947 dan sejak itu ia membangun hubungan intensif dengan sejumlah kaum intelektual muslim Indonesia. Konsep Rahman terkait bentuk baru modernisme Islam yang ia sebut neo modernis, sangat dipahami oleh masyarakat Indonesia dan digunakan untuk menggambarkan segala bentuk pemikiran modernis baru. Pemikir muslim dari gerakan intelektual tersebut adalah Djohan Effendi, Nurcholish Majid,

---

<sup>6</sup> Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: sejarah, konsepsi, penyimpangan, dan jawabannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).



dan Abdurrahman Wahid. Meski mereka jarang menggunakan bahasa tersebut, istilah tersebut digunakan untuk membedakan kedudukan mereka dari modernisme sebelumnya. Komunitas neo modernisme menawarkan pendekatan baru pada konsep ijtihad, dimana pola pendekatan yang dilakukan adalah pengembangan dari kelanjutan yang lebih jauh, yang pernah dipakai oleh kaum modernis sebelumnya.<sup>7</sup>

Meminjam paparan Denny JA sebagai kontributor jaringan Islam liberal, ia berpendapat bahwa Islam liberal adalah kelompok yang menginterpretasi Islam yang paralel dengan modernitas dan demokrasi. Demokrasi sebagaimana diteorikan dan dipraktikkan di dunia, adalah bersifat sekuler, dimana negara mengambil jarak yang sama atas pluralisme agama ataupun pluralitas interpretasi agama.<sup>8</sup> Pertarungan antara Islam liberal dan fundamentalisme dapat dilihat dalam paparan dan penjelasan Leonard Binder, seorang intelektual Barat yang juga merupakan teman dari Fazlur Rahman. Dalam karyanya, *Islamic Liberalism* 1998, Binder mengkritik pendapat-pendapat Maududi serta pendapat Dhiyauddin ar-Rais yang mengkritik buku Ali Abdul Raziq. Menurut Binder, pertarungan kedua paham tersebut kemungkinan akan dimenangkan oleh Islam fundamentalis. Alasan dari nya adalah karena Islam liberal itu baru diminati oleh kalangan yang berpendidikan Barat, elit birokrasi modern, elit akademisi, praktisi hukum dan kaum borjuis perkotaan. Meski demikian, menurutnya fundamentalisme masih merupakan orientasi minoritas dan sulit untuk menggusur atau menguasai Islam tradisional kaum Mullah, kaum terdidik, dan majelis taklim.<sup>9</sup>

Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, istilah “Islam progresif” (yang menawarkan sebuah kontekstualisasi penafsiran Islam yang terbuka, ramah, segar, serta responsif terhadap persoalan-persoalan

---

<sup>7</sup> Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid.*

<sup>8</sup> Husaini dan Hidayat, *Islam Liberal: sejarah, konsepsi, penyimpangan, dan jawabannya.*

<sup>9</sup> Zuly Qodir, *Islam Liberal; Varian-varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002..*

kemanusiaan), “Islam liberal” (Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas), “Islam sekuler” (Sekularisme merupakan akar dari liberalisme dan hadirnya pemisahan kehidupan agama dan publik), “Islam reduksionis” (Islam sebagai agama yang mana agama adalah seperti peradaban, berevolusi dari satu tahapan ke tahapan berikutnya), Islam akomodatif (Islam adalah agama yang elegan dan bisa beradaptasi dengan budaya serta tradisi, selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan stari’ah) dan lainnya sebenarnya merujuk pada hal yang sama, yaitu tentang Islam yang tunduk atau tersubordinasi pada Barat. Kajian mengenai Jaringan Islam Liberal dapat ditemukan dalam beberapa tulisan, diantaranya; *Pertama*, tulisan dari Noviansi, Fakhruddin dan Budiarti. Ketiganya menjelaskan bahwa ada pro kontra yang mengiringi hadirnya kelompok JIL di Indonesia. kalangan fundamentalis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pembela Islam (FPI) adalah pihak yang kontra terhadap kehadiran JIL. Kemudian hadir fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan liberalisme dan pluralisme yang juga terkesan spesifik mengalamatkan pada JIL dan kelompok Islam lain yang mempunyai perjuangan sejenis. Ketiga penulis tersebut menjelaskan juga bahwa ada tiga tema yang diangkat JIL dalam sejumlah diskusinya, seperti tema gender (hak perempuan dan penggunaan jilbab), pernikahan beda agama, dan kekerasan dalam Islam.<sup>10</sup>

*Kedua*, tulisan dari Erowati yang menjelaskan tentang Islam liberal di Indonesia. Ia mengutip penelitian Zuli Qodir (2010) yang mengemukakan bahwa terdapat beberapa varian pemikiran Islam liberal di Indonesia. Pertama, Liberal progresif; pemaknaan ini sebenarnya lebih dialamatkan pada adanya perubahan yang diarahkan pada pemahaman atas Islam. Liberal progresif sebagai representasi dari aktif-aktor Islam yang pernah

---

<sup>10</sup> Citra Nur Noviansi, M. Fakhruddin, dan Budiarti, “Jaringan Islam Liberal: Gerakan Liberalis Islam Serta Pergerakan dan Perkembangannya di Indonesia (2001-210),” *Jurnal Sejarah Lontar* 10, no. 1 (2013): 24–25.

merasakan gelapnya masa depan Islam Indonesia ketika negara represif terhadap umat Islam. Cendekiawan yang memiliki pola pemikiran ini, berkeyakinan bahwa ketidakharmonisan Islam dan negara adalah karena akibat dari perjuangan Islam politik yang terkait dengan birokrasi kekuasaan, dan itu dapat dijumpai dengan proses politik dan peran birokrasi. Kedua, Liberal radikal; bahwa ketidakadilan selama ini disebabkan karena adanya struktur sosial yang tidak seimbang, baik yang dijalankan oleh negara ataupun individu. Bagi kalangan ini, ketimpangan sosial yang terjadi adalah disebabkan oleh struktur sosial yang tidak adil. Ketiga, Liberal moderat; kelompok ini tidak menjadikan Islam sebagai ideologi politik maupun mencita-citakan Islam politik yang menuntut Islam harus terlibat dalam kebijakan negara secara langsung. Dalam persoalan partai misalnya, kelompok ini tidak peduli apakah label partai itu Islam atau tidak, yang penting apakah mereka berjuang untuk kebenaran, keadilan, demokrasi atau tidak. Keempat, Liberal transformatif; prinsip pemikiran ini mencoba mempertanyakan kembali paradigma mainstream yang ada dan ideologi yang ada di dalamnya, juga berupaya untuk menemukan paradigma alternatif yang diharapkan dapat mengubah struktur dan super struktur yang menindas rakyat. Para pemikir liberal transformatif berpendapat bahwa Islam sudah seharusnya mempunyai dapat memunculkan pandangan yang memihak.<sup>11</sup>

Komaruddin Hidayat sebagaimana dikutip dalam buku Adian Husaini dan Nuim Hidayat, menyatakan bahwa ekspresi pemikiran liberal dalam politik adalah menolak formula klasik, dengan contoh ekstremnya antara lain terlihat pada Ali Abdur Raziq dan Kemal Attaturk. Fenomena pemikiran dan gerakan Islam liberal di Indonesia dapat dilihat dari kehadiran Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan sejumlah pemikiran yang mereka gagas. Dalam artikel ini, terdapat dua hal yang ingin dibahas terkait

---

<sup>11</sup> Dewi Erowati, "Islam Liberal di Indonesia (Pemikiran dan Pengaruhnya dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 21–23.

Islam liberal di Indonesia, yaitu; (1) Bagaimana pandangan JIL terhadap relevansi agama dan politik? serta (2) Bagaimana pandangan JIL terhadap implementasi demokrasi dalam konteks Islam liberal?

### **Profil Jaringan Islam Liberal (JIL)**

Jaringan Islam Liberal atau yang dikenal dengan JIL, berdiri pada tanggal 9 Maret 2001 dan pada awalnya beranggotakan puluhan aktivis intelektual muda. Jaringan ini dianggap sebagai sebuah forum bersama umat Islam moderat yang menyokong gagasan mengenai isu-isu sosial keagamaan daripada perspektif demokrasi dan pluralisme. Kehadiran JIL dikenal karena menampilkan pandangan golongan muslim moderat melalui media massa. Selain itu, kehadiran jaringan ini disebut sebagai penentangan terhadap golongan ‘garis keras’ atau golongan ekstremis seperti HTI, FPI, JI dan lainnya. Karenanya, jaringan ini berusaha menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka mengadakan sebuah program yang menghimpun pandangan keagamaan yang mencerminkan demokrasi, pluralisme, sensitif gender, dan bermaksud ke arah kemajuan. JIL juga berusaha untuk memperlihatkan wajah golongan muslim moderat sebagai sebuah kesatuan.<sup>12</sup>

JIL adalah refleksi dari pengembangan gagasan para “kader-kader” Nurcholish Madjid setelah ia meluncurkan gagasan sekularisasi dan ide-ide teologi inklusif-pluralis dengan Paramadina-nya. Sejak tanggal 25 Juni 2001, JIL mengisi satu halaman Jawa Pos wawancara seputar perspektif Islam liberal. Selain itu, tiap Kamis sore, JIL menyiarkan langsung sebuah wawancara dan talkshow serta diskusi interaktif dengan para kontributor Islam liberal, melalui kantor berita radio 68 H dan puluhan radio jaringannya. Dalam konsep JIL, talkshow tersebut dinyatakan sebagai upaya mengundang sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai

---

<sup>12</sup> Ahmad Yumni, Abu Bakar, dan Mohd Fairuz Jamaluddin, *Menjawab Islam Liberal; Pendedahan Agenda Jaringan Islam Liberal dan Sisters in Islam* (Malaysia: PTS Publishing House, 2016).

“pendekar pluralisme dan inklusivisme” untuk berbicara tentang berbagai isu sosial keagamaan di tanah air. Sejumlah media massa yang juga aktif meluncurkan gagasan-gagasan Islam liberal dalam buku Adian disebutkan seperti Kompas, Koran Tempo, Republika, Majalah Tempo dan lainnya. JIL juga bekerjasama dengan sejumlah intelektual, penulis dan akademisi dalam serta luar negeri, untuk menjadi kontributornya. Di samping aktif kampanye melalui internet dan radio, sejumlah aktivis Islam liberal juga menerbitkan jurnal Tashwirul Afkar, yang diketuai oleh Ulil Abshar Abdalla. Jurnal yang terbit empat bulananya tersebut resmi dibawah oleh Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM) Nahdlatul Ulama (NU), bekerjasama dengan *The Asia Foundation*.<sup>13</sup>

Jaringan Islam Liberal (JIL) mempunyai semboyan “Islam yang membebaskan”. Istilah liberal yang ada mengacu pada keadaan atau sikap orang atau sebuah gerakan pemikiran tertentu yang bersedia merekonstruksi dan menghargai gagasan atau perasaan orang lain, yang juga mendukung perubahan-perubahan, baik sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan melalui “pembebasan” pemikiran dari pandangan dunia dan sikap literal-dogmatis, reaksioner atau pro status quo. JIL adalah salah satu lokomotif yang menggerakkan tata nilai pemikiran keagamaan yang menekankan pada pemahaman Islam yang terbuka, toleran, inklusif dan kontekstual.<sup>14</sup> Misi JIL terbagi menjadi tiga bagian: (1) mengembangkan penafsiran Islam yang liberal sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka anut, serta menyebarkannya seluas mungkin kepada khalayak, (2) mengusahakan terbukanya ruang dialog yang bebas dari tekanan konservatisme, karena dengan begitu akan memekarkan pemikiran yang sehat, (3) mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik yang manusiawi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Husaini dan Hidayat, *Islam Liberal: sejarah, konsepsi, penyimpangan, dan jawabannya*.

<sup>14</sup> Muh Idris, “Potret Pemikiran Radikal Jaringan Islam Liberal (JIL) Indonesia,” *Jurnal Raden Intan* 8 No.2, no. Desember (2019): 369.

<sup>15</sup> Muhammad Harsono, “Nikah Beda Agama Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL),” *Jurnal Al-Ahwal* Vol 2. No., no. uin sunan kalijaga yogyakarta (2009): 92.

JIL selalu membuka diri pada pengembangan wawasan keislaman, yang lebih dinamis seperti; (1) Keterbukaan pintu ijtihad pada semua aspek; mereka percaya bahwa ijtihad atau teks-teks keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan dalam tiap suasana dan keadaan. (2) penekanan pada semangat religio, etik, bukan pada makna literal sebuah teks; ijtihad yang dikembangkan oleh Islam liberal adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religi etik al-Qur'an dan sunnah Nabi, bukan hanya menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks. (3) kebenaran yang relatif terbuka dan plural; Islam liberal mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran sebagai sesuatu yang relatif, sebab sebuah penafsiran adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung oleh konteks tertentu. (4) pemihakan pada minoritas dan tertindas; Islam liberal mendasarkan diri pada suatu penafsiran keislaman yang memihak kepada yang kecil tertindas dan dipinggirkan. (5) kebebasan beragama dan berkepercayaan; Islam liberal menganggap bahwa urusan beragama adalah hak perorangan yang harus dilindungi. (6) pemisahan otoritas duniawi dan ukhrowi, otoritas agama dan politik; Islam liberal percaya pada keniscayaan pemisahan antara kekuasaan keagamaan dan politik. Islam liberal tidak membenarkan gagasan tentang negara agama dimana otoritas seseorang ulama atau kyai dipandang sebagai kekuasaan tertinggi yang tidak bisa salah.<sup>16</sup>

### **Islam Liberal dalam Agama dan Politik**

Pemikiran Islam liberal juga dijumpai pada konsep tentang kenegaraan dan politik. Dimulai oleh Ali Abd. Raziq (1888-1966) yang mendobrak sistem khilafah, menurutnya Islam tidak memiliki dimensi politik karena Muhammad hanyalah pemimpin agama. Lalu diteruskan oleh Muhammad Khalafullah (1926-1997) yang mengatakan bahwa yang

---

<sup>16</sup> Idris, "Potret Pemikiran Radikal Jaringan Islam Liberal (JIL) Indonesia."

dikehendaki oleh Alquran hanyalah sistem demokrasi tidak yang lain.<sup>1718</sup> Ali Abdurraziq mempertanyakan tentang anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan sistem khilafah merupakan kewajiban agama. Menurutnya, model pemerintahan khilafah tidak diperlukan. Khilafah adalah suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak pada seorang kepala negara atau pemerintahan dengan gelar khalifah, pengganti Nabi Muhammad SAW dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat-rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya. Abdurraziq menyatakan, tidak ditemukan satupun argumentasi yang mendukung teori para ulama yang menyatakan bahwa kekhalifahan itu merupakan akidah syariah dan salah satu di antara hukum-hukum agama.<sup>19</sup>

Masih menurut Ali Abdurraziq, Nabi Muhammad SAW adalah rasul Tuhan yang hanya membawa misi risalah saja. Nabi SAW tidak pernah memerintah dengan mengatasnamakan suatu pemerintahan tertentu. Nabi hanya menyampaikan dakwah agama tanpa ada kecenderungan untuk membentuk kekuasaan politik atau pemerintah tertentu. Risalah bukanlah kerajaan; keduanya adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing mempunyai kedudukan sendiri. Nabi Muhammad memang mempunyai hukuman, tetapi ia bukanlah seorang malik (raja). Ali Abdurraziq berkesimpulan bahwa sistem pemerintahan tidak terdapat dalam Islam. Jadi, Islam tidak menentukan tentang pembentukan negara dan tidak menetapkan suatu corak atau model khusus dari suatu pemerintahan. Nabi hanya bertugas sebagai pembawa risalah, dan tugas kerasulannya ini tidak tercakup di dalam tugas pembentukan negara.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Leonard Binder, *Islam Liberal: Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

<sup>18</sup> Dalam buku Leonard dijelaskan juga bahwa Ali Abdul Raziq sendiri akhirnya di pecat oleh anggota ulama Al-Azhar akibat pemikiran yang ia keluarkan.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Penamedia Grup, 2015).

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari*  
Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy | Vol. 1, No. 2, Mei - Oktober 2020

Pada konteks agama dan politik, alih-alih dari menafsirkan tujuan-tujuan Islam secara asli untuk direalisasi melalui saluran-saluran politik dan pemerintahan, dimana hal itu akan menundukkan politik pada nilai-nilai Islam yang telah ditafsirkan, apakah liberal, modern, fundamentalis dan lainnya, maka yang terjadi sebenarnya adalah eksploitasi Islam oleh partai-partai politik dan kepentingan kelompok. Kelompok-kelompok tersebut menundukkan Islam tidak hanya pada politik, namun bahkan pada politik praktis yang membuat Islam hanya menjadi demagogi saja. Tidak hanya itu, semboyan “Islam tidak memisahkan agama dengan politik”, menjadi hal yang terus dipergunakan untuk menipu rakyat yang tidak tahu apa-apa agar mau menerima, bahwa Islam-lah yang harus melayani tujuan semu dari partai politik.<sup>21</sup>

Penamaan “Islam liberal” menggambarkan prinsip-prinsip yang dianut, misalnya oleh Jaringan Islam Liberal (JIL), yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas. Liberal di sini bermakna dua, yaitu: kebebasan dan pembebasan. JIL percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, karena pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. JIL memilih satu jenis tafsir, dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, yaitu “liberal”.<sup>22</sup>

Surahman dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa sejak didirikannya, JIL mencoba untuk menafsirkan Al-Qur’an dengan ide-ide liberalisme Islam yang diyakini oleh mereka, yaitu berdasarkan sejumlah prinsip seperti; 1) terbukanya pintu ijtihad dalam seluruh dimensi Islam, 2) penafsiran yang menitik-beratkan pada aspek etika-religius, dan bukan pada makna tekstual-literalnya, 3) percaya pada kebenaran yang relatif, terbatas dan temporal, 4) mengusung kebebasan menjalankan keyakinan

---

*Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer.*

<sup>21</sup> Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2001).

<sup>22</sup> M. Ato Mudzhar, “Perkembangan Islam Liberal di Indonesia,” *kemenag.go.id*.



agama, 5) pemihakan pada kaum tertindas dan pihak minoritas serta 6) pemisahan antara urusan agama dan urusan dunia.<sup>23</sup>

Dalam bidang syariah, JIL bukanlah kelompok pertama yang menghendaki pembaruan fikih. Jauh sebelum kelahiran JIL, banyak tokoh-tokoh yang mengendaki pembaruan ushul fiqih antara lain Hasan Turabi. Turabi menilai bahwa ushul fiqih tidak lagi relevan untuk sekarang ini. Ia hanya sesuai untuk masa tersebut. Tokoh lain adalah Abu Hamid Abu Sulaiman yang menilai ushul fiqih hanya bersifat tekstual dan *Linguistic oriented*, sehingga cenderung melupakan unsur historisitas teks. Langkah Abu Sulaiman ini diikuti oleh Muhammad Syahrur, Arkoun dan Fazlur Rahman. Arkoun mengkritik syafi'i yang telah membakukan sumber hukum Islam dan sunnah sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang unthinkable. Dalam penilaian Arkoun konstruksi ushul fiqih klasik sangat kental dipengaruhi ideologi dominan ketika itu. Sedangkan Fazlur Rahman mendesak agar metode penafsiran Alquran yang dibakukan melalui Ushul fiqih segera dirombak. Menurutnya Alquran harus dipahami dalam konteks masyarakat ketika ia diturunkan. Karena mengabaikan realitas sosial hanya akan berujung pada penegasian tujuan dan obyektifitas moral sosial Alquran.<sup>24</sup>

Kalangan Islam Liberal yang bertolak berlawanan dengan kalangan Islamisme, mereka menolak bentuk-bentuk politik Islam yang berusaha memperjuangkan superioritas sistem nilai dan simbol-simbol Islam secara formal dalam wilayah politik. Kalangan Islam Liberal sebagai manifestasi dari sikap politik mereka yang berdasarkan keyakinan sebagai Muslim menolak gagasan negara Islam, formalisasi Syariah dan berkeras dengan jalan sekularisasi yang menempatkan wilayah politik dan agama pada

---

<sup>23</sup> Cucu Surahman, "Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hindu," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 1 (2013): 67.

<sup>24</sup> Nirwan Syarfin, "Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fikih dan Ushul Fikih," *ISLAMIA Tahun II N*, no. April-Juni, Institute for the Study Islamic Thought and Civilization (INSIST) bekerjasama dengan Penerbit Khairul Bayan (2005): 45-46.

wilayah yang berbeda. Hal ini karena menganggap bahwa sekularisme merupakan jalan yang harus ditempuh oleh Umat Islam untuk menanggapi tantangan modernisasi.

Pandangan kalangan Islam Liberal tersebut terwujud pada sikap mereka terhadap keberadaan partai Islam. Perjuangan politik secara formal melalui pembentukan partai Islam menurut mereka kenyataannya tidak mendapatkan dukungan luas dari umat Islam. Dilihat dari sisi konfigurasi penduduk Indonesia, Islam yang mayoritas seharusnya dapat menguasai dan mengarahkan proses demokrasi. Partai-partai yang merupakan perpanjangan kepentingan politik Islam seharusnya dapat berbuat banyak dalam membangun politik Islam Indonesia yang anggun dan bermartabat. Kenyataannya, sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, perjuangan politik Islam selalu berhadapan dengan kelompok-kelompok sekularis yang netral agama. Uniknyanya pula, meskipun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, ternyata afiliasi politik mereka tidak serta merta kepada Islam. Sepanjang sejarah pemilu, hanya pada tahun 1955 partai-partai Islam yang memperoleh total suara 43,5%. Pada pemilu 2014, total suara partai-partai Islam hanya 30,26%.<sup>2526</sup>

Berdasarkan kenyataan rendahnya dukungan terhadap partai Islam, agaknya perlu dipertimbangkan hubungan agama dan negara yang simbiotis, yang tidak memandang Islam dan politik harus menyatu, tetapi juga tidak memisahkannya sama sekali. Islam harus memberi seperangkat aturan nilai bagi penegakan etika bernegara. Pandangan Nurcholish Madjid (Cak Nur) “Islam Yes, Partai Islam No”, barangkali sampai hari ini masih

---

<sup>25</sup> Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2006).

<sup>26</sup> Secara cukup lengkap, Lili Romli mencoba menguraikan beberapa alasan kecenderungan menurunnya dukungan terhadap partai Islam. Salah satunya, karena pengaruh perubahan orientasi pandangan politik yang diakibatkan oleh modernisasi yang dilakukan pemerintah, dan gerakan pembaharuan yang dipelopori Nurcholis Madjid. Cara pandang umat Islam tidak lagi terikat dengan simbol-simbol ke-Islaman, termasuk pada kelembagaan partai politik Islam.

sulit dibantah.<sup>27</sup> Bagi Nurcholis, persoalan negara Islam, partai politik, atau ideologi Islam adalah tidak sakral. Ia ingin mendorong umat Islam agar mengarahkan komitmen mereka kepada nilai-nilai Islam, bukan kepada institusi-institusi kendatipun memakai nama Islam.<sup>28</sup>

Berbeda dengan pikiran-pikiran yang ia kemukakan sebelumnya, yang sarat dengan rujukan dari teks-teks Al-Quran, Nurcholish membungkus ide pembaruannya dengan istilah-istilah yang kontroversial dalam perbendaharaan bahasa Islam, seperti “sekularisasi”. Istilah itu sendiri tidak dimaksudkan untuk mengacu pada proses implementasi “sekularisme” atau paham yang memisahkan agama dan dunia. Ia lebih dianggap sebagai proses sosiologis yang dapat “membebaskan” umat dari kecenderungan untuk mensakralkan hal-hal yang bersifat temporal (misalnya ideologi, negara, politik, dan sebagainya). Karena sifatnya yang kontroversial itu, digunakannya istilah tersebut telah ikut menyulut kritikan tajam dan menyebabkan sementara pihak untuk menganggap Nurcholish sebagai penganjur “sekularisasi” dalam pengertiannya yang paling konvensional.<sup>29</sup>

Serangkaian manifestasi sikap politik yang disampaikan oleh kalangan pemikir Islam liberal tersebut, mengundang kontroversi tidak saja dari kalangan yang disebut Islam radikal atau yang kerap kali disebut kalangan literal, tetapi juga bagi mereka yang justru tergolong menganut paham Islam moderat. Substansi muatan dari perdebatan atau lebih tepat disebut sebagai keberatan terhadap gagasan pemikiran Islam liberal, adalah terkait anggapannya yang terlampaui jauh dari makna kebebasan berfikir dalam makna hakiki yang dianut oleh ajaran Islam itu sendiri. Sehingga, sikap yang berlebihan dalam manifestasi perilaku para pendukung ajaran Islam

---

<sup>27</sup> Iqbal dan Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*.

<sup>28</sup> Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2001).

<sup>29</sup> Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam..*

liberal dan gagasan berupa nilai-nilai yang melandasi pemikirannya mudah sekali dituduh sebagai ajaran menyimpang dari substansi demokrasi dan kemanusiaan yang ironisnya justru ingin mereka tegakkan.

Respons umat Islam terhadap modernisasi dan sekularisasi tidak bersifat homogen. Sebagian muslim bersikap lebih akomodatif terhadap pemikiran sekuler demi modernisasi komunitas Islam. Sebagian lainnya lebih terobsesi mengenai ide modernisasi yang berorientasi Islam. Pada umumnya, arus utama Muslim Indonesia sepakat bahwa tafsir dan penerapan Islam harus dikontekstualisasikan dengan realitas sosio kultural. Namun, mereka tidak sepakat dengan bayangan ideal masyarakat masa depan sebagai basis kontekstualisasi keagamaan mereka. Di satu sisi, pendukung pemikiran “Islamisasi modernitas” cenderung mengidealkan masyarakat neoreligius, di mana identitas Islam mendominasi budaya politik masyarakat dan negara. Di sisi lain, pendukung pemikiran “modernisasi Islam” lebih terbuka dengan masyarakat plural-sekuler, di mana ditegaskan sebagai prinsip etika yang dapat berbagi dengan etika agama lain atau bahkan dengan paham humanisme sekuler. Obsesi yang pertama mengarah pada kebangkitan partai politik Islam yang berasaskan prinsip Islam, sedangkan yang kedua mengarah pada pembentukan partai politik “sekular religius” yang berasaskan Pancasila.

Sentimen keagamaan pada konteks negara bangsa (*nation state*) tidak dapat dipisahkan dari persoalan interpretasi nilai-nilai keagamaan. Relevansi faktor ideologis terutama terkait dengan pemahaman seberapa jauh aplikasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya diwujudkan, menjadi penting, karena merupakan salah satu faktor penopang keyakinan menegakkan nilai-nilai agama secara komprehensif. Dalam hal ini terdapat kalangan yang meyakini bahwa relevansi agama dalam politik adalah mutlak mengingat sifat agama Islam sebagai pegangan hidup komprehensif yang mengatur soal-soal di luar urusan privat. Interpretasi agama semacam itu sejalan dengan tipologi pemikiran Islam.

Sejumlah kalangan di atas dapat dipotret dalam kelompok berikut; *Pertama*, adalah kelompok yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, yang lengkap dengan peraturan segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. *Kedua*, adalah aliran pemikiran yang disebut sebagai jalan tengah, yang selain menolak pendapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap dan Islam memiliki sistem kenegaraan, aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam merupakan agama seperti dalam pemahaman barat yang hanya mengatur manusia dengan Tuhan. Agama dan negara berhubungan secara simbiotik. Aliran ini meyakini memang dalam Islam tidak diatur tentang masalah sistem kenegaraan, namun demikian Islam mengandung tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. *Ketiga*, adalah aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama yang tidak memiliki hubungan dengan urusan kenegaraan.<sup>30</sup>

### **Perkembangan Islam Liberal saat ini.**

Dalam mendiskusikan masa depan Islam liberal di Indonesia, Samsu Rizal Panggabean, menganggap bahwa agenda Islam liberal saat ini sarat dengan agenda lama yang sudah tidak relevan lagi. Dicontohkan, polemik mengenai penyatuan agama dan negara, negara sekular, dan kekhalifahan fiqih lainnya sudah harus disingkirkan dari kerja Islam liberal. Di samping itu, terkait topik fundamentalisme dan westernisasi. Historiografi modern telah menempatkan kebudayaan Islam dalam waktu universal (*welzeit*) yang menempatkan secara sinkronis selevel dengan kebudayaan-kebudayaan lain.<sup>31</sup>

Salah satu kelemahan Islam liberal di Indonesia adalah kurangnya perhatian khusus terhadap masalah-masalah manusia Indonesia, seperti kesejahteraan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lainnya. Fokus yang

<sup>30</sup> Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soebarto* (Jakarta: LP3ES, 2003).

<sup>31</sup> Prayudi, "Pemikiran Politik Islam Liberal dan Perkembangannya di Indonesia Dewasa Ini," *Politica* Vol. 4 No., no. November (2013): 217.

berlebihan kepada agenda-agenda lama, adalah salah satu sebabnya. Seolah-olah menjadi Islam liberal berarti menanggapi opini orang Eropa dan Amerika mengenai kebudayaan Islam. Atau, mengurus khilafah fiqih, seperti halnya masalah rajam, yang seharusnya cukup menjadi perhatian dan kajian secara terbatas, misalnya di lingkungan pesantren. Sebagai latihan intelektual pun hal-hal semacam itu tidak memadai, karena hanya sebatas berujung pada soal mengetahui sejarah, bukan menggagas jalan yang baru dan positif yang memungkinkan manusia Indonesia membebaskan diri. Sehingga, ajakan ke arah partikularisme ke Indonesiaan perlu diajukan supaya eksis, misalnya *think tank* Islam liberal yang beroperasi dengan kesadaran dalam melawan arus penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan sekedar secara kelompok masing-masing.<sup>3233</sup>

Media Zainul Bahri dalam tulisannya menuliskan bahwa saat ini nama JIL memang tidak familiar lagi jika dibanding dengan ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah. Meski sayup, JIL sebetulnya masih eksis dengan menggelar diskusi-diskusi keislaman dan menyebar gagasannya melalui situs Islam.lib. JIL pernah menjadi kelompok yang sangat terkenal pada masa kajian-kajian Islam Indonesia pada awal dan pertengahan tahun 2000. Memang JIL tidak termasuk dan tidak dimaksudkan sebagai ormas, namun tempat untuk “menampung” gagasan-gagasan intelektual muda yang memiliki dan kemudian menyebarkan gagasan Islam progresif. Sebagaimana penjelasan Moqsith Ghazali yang dikutip oleh Bahri dalam tulisannya, mengemukakan bahwa ada tiga hal utama yang membuat JIL semakin lemah. *Pertama*, JIL kalah cepat dalam merespons isu-isu aktual keislaman dari lembaga lain seperti NU dan UIN. *Kedua*, Ketiadaan dukungan dana yang memadai untuk kegiatan-kegiatan JIL. Sejak tahun 2001-2005, JIL didanai oleh The Asia Foundation (TAF), dan kemudian

---

<sup>32</sup> Luthfi Assyaukanie, *Wajah Liberal Islam di Indonesia* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal : Teater Utan Kayu, 2002).

<sup>33</sup> Lihat Samsu Rizal Panggabean, “Prospek Islam Liberal”, dalam Luthfi Assyaukanie (Penyunting), *Wajah Liberal Islam di Indonesia*.

akhirnya TAF tidak lagi mengurus teologi. Ketiga, JIL dan penyebutan “Islam liberal” mendapat kritik dari tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan UIN yang dulu adalah pendukungnya. Lebih lanjut Ghazali dalam tulisan Bahri menjelaskan bahwa ketika Islam radikal melakukan aksi terorisme di sejumlah tempat di Indonesia, maka tokoh-tokoh Islam moderat dari NU, Muhammadiyah dan UIN melakukan kritik yang tajam terhadap radikal Islam dan berkampanye mengenai Islam moderat. Bersamaan dengan mengkritik Islam radikal, maka mereka juga mengkritik Islam liberal dan berkampanye tentang Islam moderat.<sup>34</sup>

### **Pengaruh Pemikiran Islam Liberal Terhadap Partai Islam di Indonesia**

Apa yang disemaikan oleh para intelektual Islam Liberal telah tumbuh dan berkembang secara sangat luar biasa, sebagaimana ditunjukkan misalnya ketika pemilu 1999, sebagai pemilu pertama kali diselenggarakan di era reformasi. Saat itu, kekuatan-kekuatan politik Islam yang mengedepankan eksklusifisme, negara Islam, dan pemahaman Islam yang skripturalis, tidak mendapatkan dukungan dari umat Islam Indonesia dalam pemilu tersebut. Partai-partai politik yang menjadi tempat bermukimnya kekuatan Islam non liberal, baik secara tegas maupun yang cenderung masih malu-malu, dianggap hanya memperoleh suara pada pemilu mendatang, apabila membuka diri, bersikap pluralis, toleran, dan inklusif, yang kesemuanya merupakan ciri-ciri dari Islam Liberal.

Sejalan dengan pandangan di atas, menurut Saiful Mujani, Islam liberal dapat dianggap telah berhasil menjalankan misi pemikirannya, kalau menggunakan ukuran hasil pemilu tahun 1999. Dua partai yang tidak berideologi Islam memperoleh suara terbanyak di Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, yaitu PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai

<sup>34</sup> Media Zainul Bahri, “Ruh Hidup dalam Jasad Kaku: Mengenang Peran Intelektual Jaringan Islam Liberal (JIL) dalam Diskursus Islam Indonesia,” *Ilmu Ushuluddin* 2, no. 3 (2015): 295–297.

Golongan Karya. Persoalannya, menurut Saiful Mudjani, perkembangan ini terletak pada pertanyaan klarifikasi, apakah pemilih PDIP dan Partai Golkar pada Pemilu 1999 adalah pemilih Islam atau bukan? Pertanyaan tersebut menurut Saiful Mujani tidak perlu ada, dan tidak membutuhkan jawaban, karena kriteria utama dan mungkin satu-satunya yang dapat dipergunakan apakah seseorang itu Islam atau non Muslim, adalah kepercayaan dan bagaimana yang bersangkutan melaksanakan Rukun Islam?<sup>35 36</sup>

Meskipun mayoritas tetapi keyakinan dan pemahaman keagamaan dikalangan Muslim Indonesia cenderung tidak homogen. Ada abangan, santri, baik peduli atau tidak peduli pada adanya partai Islam atau sekuler. Ada yang formalis, ada pula yang substansialis. Jika menggunakan perolehan suara partai Islam pada sejarah pemilu di Indonesia, ternyata partai-partai Islam tidak pernah muncul sebagai kekuatan yang menentukan. Artinya, sejauh menyangkut nasib politik, hasil pemilu memperlihatkan bahwa Islam sebagai kekuatan politik tidak dapat memperoleh suara yang signifikan, apalagi mencapai menjadi kekuatan mayoritas dari total jumlah kursi parlemen. Meskipun persentase dukungan politik secara kepartaian dalam pemilu, suara pemilih Islam terfragmentasi dan tidak mencapai mayoritas, sampai saat ini umat Islam masih merupakan kelompok strategis yang banyak dipertimbangkan, terutama terkait pemilu. Isu-isu menonjol yang menjadi tema kampanye antara lain berkisar tentang Islam. Hal ini menunjukkan betapa signifikannya suara Islam, sekalipun realitas “kursi”

---

<sup>35</sup> Assyaukanie, *Wajah Liberal Islam di Indonesia*.

<sup>36</sup> “Islam Liberal dan Seputar Istilah”, dalam Luthfi Assyaukanie (Penyunting), *Wajah Liberal Islam di Indonesia*. Sikap yang optimis di atas, berbeda dengan pandangan yang disampaikan oleh Ulil Abshar Abdalla. Menurut Ulil, gerakan Islam Liberal di Indonesia telah gagal atau bahkan tidak hanya gagal, tetapi dapat dianggap menemui kegagalan secara total. Dalam rangka memperkuat pernyataannya tersebut, Ulil mempertanyakan apa dapat diperbuat oleh para intelektual liberal, ketika kekerasan demi kekerasan melanda Indonesia, ketika orang-orang yang mengatasnamakan agama saling membunuh, menghalalkan darah, merusak jalan, pohon dan gedung. Ulil secara tegas menyebutkan bahwa Islam Liberal telah gagal dipahami oleh masyarakat secara luas.



politik Islam berada dalam posisi marginal. Tetapi yang lebih utama untuk diperhatikan adalah kesadaran tentang betapa pentingnya suara dukungan dan isu terkait Islam, politik Islam justru dianggap lebih menampilkan diri secara terfragmentasi dalam beberapa partai.<sup>37</sup>

## Islam Liberal dan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi secara etimologi dapat dipahami sebagai pemerintahan oleh rakyat, dimana prinsip utama dari demokrasi adalah persamaan, yang merupakan penegasan bahwa semua orang adalah sama. Demokrasi ingin mengatakan bahwa bentuk diskriminasi apa pun tidak dibenarkan. Maka karakteristik utama dari demokrasi adalah:

- (1) Kebebasan berbicara. Masyarakat bebas mengemukakan pendapat tanpa diiringi rasa takut, baik pendapat yang merupakan kritik ataupun dukungan terhadap pemerintah.
- (2) Sistem pemilihan yang bebas (*free election*), dimana rakyat secara teratur dan menurut prosedur konstitusi yang benar, memilih orang yang mereka percayai untuk mengurus urusan pemerintahan.
- (3) Pengakuan terhadap pemerintahan mayoritas, dan hak-hak minoritas. Dalam demokrasi, bahwa keputusan mayoritas lebih memungkinkan untuk benar, dibandingkan keputusan minoritas. Namun keputusan mayoritas bukan dimaksudkan untuk menjadikan mereka berbuat sewenang-wenang.
- (4) Partai-partai politik dalam sistem yang demokratis memainkan peranan penting, dengan partai politik, maka dimaksudkan untuk meraih penghidupan yang lebih layak bagi diri, keluarga dan keturunan kelak. Karena dengan partai politik, rakyat bisa dengan bebas berserikat.
- (5) Pemisahan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan pemisahan tersebut, maka proses *check and balances* diantara ketiganya akan mampu

---

<sup>37</sup> Durororudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).

mencegah pratik-praktik eksploitasi.

- (6) Otoritas konstitusional adalah otoritas tertinggi bagi validitas tiap undang-undang dan aturan pelaksana apapun.
- (7) Kebebasan berbuat bagi tiap individu ataupun kelompok, asal tidak melanggar kepentingan umum.<sup>38</sup>

Dengan melihat karakteristik dari demokrasi tersebut, maka ketika kita kaitkan dengan konsep serta prinsip syura dalam Islam, maka tidak berbeda dengan demokrasi. Keduanya muncul dari anggapan bahwa pertimbangan kolektif lebih mungkin menghasilkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama, dibanding pilihan individu. Sadek Jawad Sulaiman dalam tulisannya tidak melihat bahwa syura sebagai penolakan atau tidak sesuai dengan elemen dari sistem yang demokratis. Al-Qur'an menyebut syura sebagai sebuah prinsip yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Lebih lanjut Sadek menganggap bahwa syura dan demokrasi sebagai sinonim dalam konsep dan prinsipnya, meski keduanya mungkin berbeda dalam rincian penerapan yang disesuaikan dengan adat kebiasaan lokal.<sup>39,40</sup>

Dalam hal pandangan Islam liberal terkait demokrasi, dimana salah satu nilai nya adalah kebebasan, maka Mehdi Bazargan dalam tulisannya Agama dan Kebebasan melihat bahwa menjadi bebas dan otonom adalah satu hal, dan bertanggung jawab atas keyakinan dan tindakan adalah hal lain. Tuhan sudah memberikan kebebasan berpendapat dan berbuat dalam ukuran tertentu, namun Tuhan juga mengingatkan kita melalui RasulNya dan kitab suci bahwa pembangkangan, ketidakadilan dan lainnya mempunyai akibat-akibat yang mengerikan. Dengan demikian, kebebasan ada, dan demikian juga dengan tanggung jawab dan kendali, dimana semua

---

<sup>38</sup> Kurzman, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*.

<sup>39</sup> Kurzman, *Wacana Islam Liberal*.

<sup>40</sup> Sadek Jawad Sulaiman, *Demokrasi dan Syura dalam Charles Kurzman (Editor), Wacana Islam Liberal.....*

adalah pilihan masing-masing individu.<sup>4142</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi mempunyai satu konsep yang dapat dikatakan sama. Dalam wacana Islam liberal, kebebasan adalah mutlak yang juga diberi dalam agama, namun juga kelak dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan.

Abdurrahman Wahid mengemukakan pemikirannya pada konteks penegakan demokrasi di Indonesia;

*“Di negeri kita demokrasi belum lagi tegak dengan kokoh, masih lebih berupa hiasan bersifat kosmetik daripada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya. Dalam suasana sedemikian ini, unsur-unsur masyarakat yang ingin melestarikan kepincangan sosial yang ada dewasa ini tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk membendung aspirasi demokratis yang hidup dikalangan mereka yang menyadari betapa perlunya kebebasan ditegakkan dinegeri ini.”<sup>43</sup>*

Pandangan Gus Dur tentang demokrasi di atas mencerminkan bahwa tujuan dari implementasi nilai demokrasi seharusnya adalah untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Dalam hal perjuangan demokrasi, Gus Dur mengatakan bahwa “Seperti halnya kemerdekaan, demokrasi dalam artian sebenarnya, terlepas dari predikat apapun yang dilekatkan padanya, tidak akan datang begitu saja dengan sendirinya. Ia haruslah dicapai dengan pengorbanan.” Greg Barton dalam bukunya juga menuliskan bahwa Gus Dur selalu berusaha berjuang untuk rakyat, yang mana upayanya juga didukung oleh latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga ulama dan pendiri NU. Gus Dur mengajak para ulama untuk memperluas wawasan dan cara pandangya agar keluar dari ikatan-ikatan sempit pendidikan Islam ‘tradisional’.

<sup>41</sup> Kurzman, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*.

<sup>42</sup> Mehdi Bazargan, *Agama dan Kebebasan dalam Charles Kurzman (Editor), Wacana Islam Liberal....*

<sup>43</sup> Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*.

Jaringan Islam liberal dalam buku Adian Husaini disebutkan juga bermaksud memerangi kaum fundamentalis atau kaum militan, karena dianggap menghalangi proses demokratisasi di Indonesia. “Sudah tentu, jika tidak ada upaya-upaya untuk mencegah dominannya pandangan keagamaan yang militan itu, boleh jadi, dalam waktu yang panjang, pandangan-pandangan kelompok keagamaan yang militan ini bisa menjadi dominan. Hal ini, jika benar terjadi, akan mempunyai akibat yang buruk buat usaha memantapkan demokratisasi di Indonesia”. ([www.islamlib.com](http://www.islamlib.com))<sup>44</sup> Dalam situs islamlib terdapat pula tulisan M.Zainuddin yang menulis tentang Islam dan Demokrasi. Zainuddin menjelaskan memang jika dilihat dari basis empiriknya, menurut papasran Aswab Mahasin (1993), agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sedangkan demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialetikanya sendiri. Namun demikian, menurut Mahasin tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Dalam perspektif Islam, elemen-elemen demokrasi mencakup syura, musawah adalah, amanah, masuliyah, dan hurriyah.<sup>45</sup>

Meski demikian, memaknai keterkaitan Islam dan Demokrasi juga tidak se-sederhana yang ada. Bahtiar Effendy dalam tulisannya di situs tersebut menuliskan bahwa ada pula muslim yang berpandangan bahwa syura itu beda dengan demokrasi. Dalam perspektif ini, yang menjadi acuan adalah bahwa muslim tidak dibolehkan untuk menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan terhadap segala sesuatu yang dipercaya bertentangan dengan hukum Allah. Karena hal demikianlah, Muhammad Natsir tidak bisa sepenuhnya menerima pandangan Barat tentang demokrasi. Sebagai perbandingan, Natsir mencetuskan apa yang disebutnya sebagai teo-demokrasi-demokrasi yang berketuhanan. Diperlukan kehati-hatian untuk membangun pandangan yang bersahabat antara

---

<sup>44</sup> Husaini dan Hidayat, *Islam Liberal: sejarah, konsepsi, penyimpangan, dan jawabannya*.

<sup>45</sup> M Zainuddin, “Islam dan Demokrasi.”

Islam dan demokrasi. Mengutip paparan TJ Pimple dalam tulisannya, Bahtiar menjelaskan bahwa gagasan demokrasi yang tidak lazim. Praktik demokrasi di negara-negara skandinavia, Israel dan Jepang berbeda secara cukup berarti dengan Eropa Barat dan Amerika Utara. Hal ini terjadi karena demokrasi mengalami “pribumisasi” atau kontekstualisasi yang secukupnya. Dengan itu, demokrasi disesuaikan dengan struktur budaya masyarakat setempat, sehingga memungkinkan akomodasi. Menurut Bahtiar, bukankah saat ini sudah waktunya berbicara mengenai demokrasi dalam konteks budaya Indonesia? Tanpa hal itu, maka demokrasi tidak mungkin mendapat dukungan sebagian besar umatnya yang masih menganut paham paternalistik.<sup>46</sup>

Pemikiran-pemikiran Gus Dur terkait kehidupan sosial, demokrasi dan akomodasi terhadap hak asasi manusia pada masanya dianggap sangat ‘radikal’. Beliau secara langsung mengatakan bahwa ajaran Islam akan lebih bermakna bila langsung menjawab persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti halnya masalah hak asasi manusia, masalah pembangunan, masalah ketimpangan dan masalah demokrasi. Bagaimana agar para ulama tidak hanya berbicara masalah akhirat saja tetapi agama dan ulama bisa langsung menjawab tantangan kehidupan sehari-hari. Kritik Gus Dur terhadap peran sosial dan intelektual para ulama ini beliau sampaikan dalam berbagai tulisan yang diterbitkan oleh berbagai media dan juga dalam setiap kesempatan berbicara diberbagai forum. Sehingga Gus Dur dengan pola pikir, cara pandang Islam modern tersebut langsung mendapat tempat dalam pemikiran Islam Liberal sebagai bentuk antitesa dari pemikiran Islam ‘tradisional’ yang memisahkan antara dunia agama dengan dunia politik, demokrasi yang menjawab kebutuhan kehidupan *real* masyarakat.

Gus Dur dalam pemikirannya mengatakan bahwa ‘ulama-intelekt’ lebih utama dan penting bagi masyarakat dari pada ‘intelekt-ulama’, sebab

---

<sup>46</sup> Bahtiar Effendy, “Mengaitkan Islam dan Demokrasi Bukan Perkara Gampang.”  
Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy | Vol. 1, No. 2, Mei - Oktober 2020

yang terakhir merupakan intelektual yang menukarkan peran ulama dengan cara membicarakan sangat sedikit saja ajaran-ajaran keagamaan. “Ulama-intelek” menekankan pesan mereka pada ajakan perbaikan akhlak pribadi. Sedangkan jenis “intelek-ulama” lebih senang menawarkan tema besar misalnya superioritas peradaban Islam dan sebagainya.<sup>47</sup>

## Kesimpulan

Kebangkitan Islam di Indonesia mempunyai ciri yang khas, yaitu kebangkitan yang terdiri dari berbagai aliran, dan salah satu yang dominan yang dapat dilihat adalah pada Islam secara kontekstual dan substansial. Pada tahun 1990-an, aliran Islam tersebut dapat dikenal dengan istilah Islam moderat, liberal atau progresif sebagaimana dijelaskan dalam buku Greg Barton. Kemunculan Islam liberal sendiri sebetulnya sudah mulai dipopulerkan pada tahun 1950 yang kemudian berkembang pesat di tahun 1980-an. Pada perkembangannya, hadir sebuah komunitas atau jaringan yang bernama Jaringan Islam Liberal (JIL). Melalui semboyannya yaitu “Islam yang membebaskan”, JIL mempunyai tiga misi utama; (1) mengembangkan penafsiran Islam yang liberal sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka anut, (2) mengusahakan terbukanya ruang dialog yang bebas dari tekanan konservatisme, dan (3) mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik yang manusiawi. Sejumlah pandangan terkait kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia mewarnai pemikiran yang diusung oleh JIL. Diantaranya adalah pemikiran tentang pluralisme, sosial politik, humanisme dan demokrasi.

Pandangan Islam liberal dalam kehidupan sosial politik adalah bahwa JIL menolak bentuk-bentuk politik Islam yang berusaha memperjuangkan superioritas sistem nilai dan simbol-simbol Islam secara formal dalam wilayah politik. Kalangan Islam Liberal sebagai manifestasi dari sikap

---

<sup>47</sup> Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*.

politik mereka yang berdasarkan keyakinan sebagai Muslim menolak gagasan negara Islam, formalisasi syariah dan berkeras dengan jalan sekularisasi yang menempatkan wilayah politik dan agama pada wilayah yang berbeda. Pandangan Cak Nur yang terkenal dengan *Islam Yes, Partai Islam No* masih relevan hingga kini bagi pemikir Islam liberal.

Pada konteks kehidupan Islam dan demokrasi, Gus Dur sebagai salah satu tokoh yang diklasifikasikan pada kalangan Islam liberal berpendapat bahwa individu memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dilanggar, tanpa meremehkan arti dirinya sebagai manusia. Hak dasar itulah yang disebut sebagai hak asasi manusia. Mehdi Bazargan dalam tulisannya *Agama dan Kebebasan* melihat bahwa menjadi bebas dan otonom adalah satu hal, dan bertanggung jawab atas keyakinan dan tindakan adalah hal lain. Tuhan sudah memberikan kebebasan berpendapat dan berbut dalam ukuran tertentu, namun Tuhan juga mengingatkan kita melalui RasulNya dan kitab suci bahwa pembangkangan, ketidakadilan dan lainnya mempunyai akibat-akibat yang mengerikan. Dengan demikian, kebebasan ada, dan demikian juga dengan tanggung jawab dan kendali. Gus Dur seringkali merangkul semua jenis kalangan untuk dapat saling hidup berdampingan, yang salah satunya dapat dilihat dari akomodasi Gus Dur terhadap kalangan Tiongha. Berbicara tentang demokrasi dalam pandangan Islam liberal, Gus Dur mengatakan bahwa sebagaimana halnya kemerdekaan, demokrasi dalam artian sebenarnya dan terlepas dari predikat apapun yang mengenainya, tidak akan datang begitu saja, ia harus dicapai dengan pengorbanan. Gus Dur melalui pandangan demokrasi nya mengkritik sejumlah fenomena yang ada, termasuk “ulama-intelekt” dan “intelekt-ulama”.

## Daftar Pustaka

- Assyaukanie, Luthfi. *Wajah Liberal Islam di Indonesia*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal : Teater Utan Kayu, 2002.
- Bahri, Media Zainul. “Ruh Hidup dalam Jasad Kaku: Mengenang Peran Intelektual Jaringan Islam Liberal (JIL) dalam Diskursus Islam Indonesia.” *Ilmu Ushuluddin* 2, no. 3 (2015): 295–297.
- Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999.
- Binder, Leonard. *Islam Liberal: Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Durororudin Mashad. *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Effendy, Bahtiar. “Mengaitkan Islam dan Demokrasi Bukan Perkara Gampang.”  
 ———. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Erowati, Dewi. “Islam Liberal di Indonesia (Pemikiran dan Pengaruhnya dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 21–23.
- Harsono, Muhammad. “Nikah Beda Agama Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL).” *Jurnal Al-Ahwal* Vol 2. No., no. uin sunan kalijaga yogyakarta (2009): 92.
- Husaini, Adian. *Islam Liberal, Pluralisme Agama, dan Diabolisme Intelektual*. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Husaini, Adian, dan Nuim Hidayat. *Islam Liberal: sejarah, konsepsi, penyimpangan, dan jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Idris, Muh. “Potret Pemikiran Radikal Jaringan Islam Liberal (JIL) Indonesia.” *Jurnal Raden Intan* 8 No.2, no. Desember (2019): 369.
- Iqbal, Muhammad, dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Penamedia Grup, 2015.



- Kurzman, Charles. *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mudzhar, M. Atho. "Perkembangan Islam Liberal di Indonesia." *kemenag.go.id*.
- Noviansi, Citra Nur, M. Fakhruddin, dan Budiarti. "Jaringan Islam Liberal: Gerakan Liberalis Islam Serta Pergerakan dan Perkembangannya di Indonesia (2001-210)." *Jurnal Sejarah Lontar* 10, no. 1 (2013): 24–25.
- Prayudi. "Pemikiran Politik Islam Liberal dan Perkembangannya di Indonesia Dewasa Ini." *Politica* Vol. 4 No., no. November (2013): 217.
- Qodir, Zuly. *Islam Liberal; Varian-varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2010.
- Rachman, Budhy Munawar. *Argumen Islam untuk Liberalisme*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Romli, Lili. *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2006.
- Surahman, Cucu. "Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hindu." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 1 (2013): 67.
- Syarfin, Nirwan. "Konstruksi Epistimologi Islam: Telaah Bidang Fikih dan Ushul Fikih." *ISLAMIA* Tahun II N, no. April-Juni, Institute for the Study Islamic Thought and Civilization (INSIST) bekerjasama dengan Penerbit Khairul Bayan (2005): 45–46.
- Yumni, Ahmad, Abu Bakar, dan Mohd Fairuz Jamaluddin. *Menjawab Islam Liberal; Pendedahan Agenda Jaringan Islam Liberal dan Sisters in Islam*. Malaysia: PTS Publishing House, 2016.
- Zainal Abidin Amir. *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2003.